



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADIWIJAYA BAKTI
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 55148

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.333.600.000**

1. Tanah Seluas 1053 m² di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.053.000.000
2. Tanah Seluas 1160 m² di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 330.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m²/121 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/45 m² di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 994 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m²/270 m² di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Bangunan Seluas 34 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 95.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS TYPE J / HATCH BACK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA MIO / SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 20.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 459.867.596**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.908.467.596
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.908.467.596

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.